

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan yang dilaksanakan pada masa pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah. Namun, penyelewengan dan penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan mengakibatkan krisis ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk menyebabkan munculnya tuntutan dari berbagai pihak untuk melakukan reformasi total di segala bidang. Salah satu unsur reformasi total ini adalah tuntutan pembagian wewenang atau pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Suasana reformasi juga mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan serangkaian penyempurnaan terhadap Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Negara yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan baru, peraturan dan ketetapan baru (*new rules*). Sesuai dengan TAP MPR tersebut, Pemerintah bersama-sama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Dalam undang-undang tersebut

Erti Efrianti Juhariah, 2014

***Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dirumuskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pun mengamanatkan otonomi daerah seluas-luasnya terutama dalam upaya penyediaan sumber-sumber pendanaan dengan adanya sistem keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah.

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut ialah desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu asas yang diatur dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Daerah otonom dimaksudkan agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Bersamaan dengan penyerahan atau pengalihan urusan daerah kepada daerah yang bersangkutan, maka reformasi tidak hanya mencakup reformasi kelembagaan tetapi juga reformasi manajemen. Salah satu hal yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah permasalahan mengenai keuangan. Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan atau bahkan pertanggungjawaban dan evaluasi.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban kepada publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Di tengah peradaban masyarakat yang semakin maju ini pertanggungjawaban tersebut tidak cukup hanya dengan laporan lisan saja, tetapi perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis tersebut ialah dengan penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang ada mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pada pemerintah daerah merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Baik buruknya suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem akuntansi yang membentuknya. Laporan keuangan yang buruk dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya yang akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan penyaji laporan itu sendiri.

Sistem akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan seharusnya disajikan. Apabila laporan

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah daerah tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas.

Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan agar terhindar dari laporan keuangan yang mengandung salah saji, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan memproses data yang dilakukan oleh pihak yang dipercaya untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan ditindaklanjuti. Sebelum laporan kinerja keuangan disampaikan kepada para konstituen, terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen yang berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat oleh pemerintah telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sesuai dengan Pasal 23 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan telah menjadi agenda wajib BPK RI yang sifatnya tahunan atas pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan *auditee*.

Pada pemeriksaan tersebut BPK akan memberikan opininya terhadap LKPD. Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Relevan

Adapun maksud dari relevan ialah informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan :

- a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), yakni memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, serta kinerja di masa datang.
  - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feed back value*).
  - c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
2. Andal (*reliability*)

Maksud dari andal ialah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Ciri-ciri laporan keuangan yang andal yaitu :

- a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan harus terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

***Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yakni informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
  - c. Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*)  
Maksud dari *comparability* yaitu laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
  4. Dapat dipahami (*understandability*)  
Maksud *understandability* ialah laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dan bukan untuk mempersulit atau pun membingungkan pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya, dalam penyajian laporan keuangan tersebut masih saja terdapat permasalahan. Bahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD pun masih saja ada *temuan*.

Tabel 1.1  
Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten  
Se-Indonesia Tahun 2006-2011

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	6%	341	66%	26	5%	119*)	23%	520
2011	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426**)

\*) Termasuk 4 LKPD Tahun 2010, yang baru selesai diperiksa di Semester I Tahun 2012

\*\*\*) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2012

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012 BPK RI

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2006-2011 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada tahun 2011 seperti dilansir dalam harian lingkaran jabar, 6/6/2012, terdapat delapan kota/kabupaten di Jawa Barat yang terindikasi bermasalah dalam penyusunan LKPD. Temuan BPK tersebut terungkap dalam LHP BPK RI atas LKPD tahun 2011 yang disampaikan kepada 8 DPRD kota/kabupaten di Jawa Barat. Kedelapan daerah bermasalah tersebut salah satunya ialah Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Tabel 1.2  
Opini BPK Terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Majalengka

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2005	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011
1	Kab. Majalengka	WDP						

Sumber: IHPS I dan II Tahun 2011 serta IHPS I Tahun 2012 BPK RI (data diolah)

Hasil opini BPK seperti yang tercantum dalam tabel 1.2 semestinya harus ditindaklanjuti. Salah satu bentuk tindaklanjutnya ialah dengan mencari faktor utama penyebab opini terhadap LKPD menjadi WDP.

Dari keempat kriteria laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami tersebut yang bermasalah ialah dalam hal andal. Andal (*reliability*) sebagaimana diungkapkan oleh Mahmudi (2010) meliputi disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan harus terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan. Sedangkan untuk LKPD Majalengka seperti yang diungkap Sri, Kasubbag Akuntansi DPKAD Pemerintah Kabupaten Majalengka, pelaksanaan penyusunan LKPD di lapangan sudah baik, karena SKPD hanya tinggal mengisi pada format yang sudah disediakan. Namun, dalam neraca masih mengalami kendala, dimana penyajiannya masih terdapat salah saji, terlebih dalam hal aset sering mengalami salah penempatan.

Erty Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari informasi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diungkap oleh Sukmaningrum (2012) yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia

Untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengembangkan dan mempertahankan potensi daerah, serta memperoleh prospek yang baik di masa depan, membutuhkan manajemen dengan kinerja yang berkualitas tepatnya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang berkualitas, sehingga aktivitas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian intern merupakan suatu tolak ukur dalam menilai sehat atau tidaknya suatu organisasi, tujuannya ialah untuk mengurangi atau menekan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di dalam organisasi, menjaga kekayaan organisasi, dapat dipercayanya data pembukuan, memeriksa ketelitian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mendorong dipatuhinya politik manajemen yang ditetapkan.

3. Faktor eksternal

Adapun faktor eksternal atau lingkungan eksternal ialah suatu kondisi dimana lingkungan yang berada diluar kendali organisasi berpengaruh

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini yakni laporan keuangan.

Likert (dalam Lubis, 2011 : 499) menegaskan bahwa ‘setiap aspek dari aktivitas suatu perusahaan ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, motivasi dan efektivitas umum dari organisasi manusianya.’ Hal senada juga tercermin dari hasil workshop LGSP-USAID pada bulan Mei 2007 di Jakarta dalam grup diskusi yang bertajuk "Tantangan untuk Pelaksanaan Reformasi Keuangan Pemerintah Daerah", yakni yang menjadi tantangan atau kendala bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah salah satunya ialah kendala sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, koordinasi yang buruk dan penggunaan teknologi yang tidak memadai, serta terbatasnya jumlah lulusan perguruan tinggi dalam pelayanan sipil dan terutama di bidang teknis penganggaran, akuntansi dan manajemen keuangan, semakin menyulitkan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tuasikal (2008) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Maluku) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih

membutuhkan pengkajian lebih mendalam, khususnya mengenai pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Ishak (2007) menyatakan bahwa pengelolaan aset keuangan daerah lebih jauh lagi perlu dikenali secara bijak dan benar dari aspek-aspek sumber daya manusia itu sendiri selaku subjek pengelola aset atau keuangan tersebut.

Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti penatausahaan keuangan daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, maka penyajian harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, serta harus memahami sistem akuntansi pemerintahan, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Bagaimana pengaruh pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Ertly Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara garis besar pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman penatausahaan keuangan daerah dan pemahaman pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) dan akuntansi sektor publik mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan

Erti Efrianti Juhariah, 2014

*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

daerah, pengelolaan aset tetap daerah serta laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Kegunaan Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, tetapi juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini yakni Pemerintah Kabupaten Majalengka guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.